

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN GAYA
KEPEMIMPINAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh :

Embun Widya Sari

Pembimbing : Nur Azlina dan Julita

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : embunwidyasari@gmail.com

*The Effect Of Internal Control Systems, Presentation Of Financial Statements,
Financial Statements And Accessibility Of Transparency And Leadership Style
Accountability For Financial Management
In The District Of Hulu Indragiri*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the internal control system to optimize transparency and accountability in financial management, financial statements to optimize transparency and accountability in financial management, accessibility to optimize transparency and accountability in financial management and style of leadership to optimize transparency and accountability in financial management. In this study population used are all employees in all SKPD in Indragiri Hulu 29 SKPD, the sampling technique used in this research is purposive sampling technique. The criteria used are limited only SKPD samples that make the Regional Financial Statements as many as 29 SKPD. Furthermore, from each SKPD that the research samples were taken three people consisting of the Head of Department, Head of Finance and 2 staff of finance, in order to obtain the amount of sample as many as 87 people. Based on the results obtained from the data analysis, it can be concluded as follows: Internal Control System (SPI) and accessibility affect the transparency and accountability of financial management in governmental institution at Indragiri Hulu Regency. While presenting the financial statements and the leadership style does not affect the transparency and accountability of financial management in governmental institution at Indragiri Hulu Regency.

Keywords: Internal Control System, Financial Statements, Accessibility, Leadership Style, Transparency and Accountability

PENDAHULUAN

Menurut Mardiasmo (2006: 65) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung

jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006:68).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sementara itu, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi Kabupaten Indragiri Hulu. Adanya permasalahan pada penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang masih belum memenuhi kriteria penyusunan laporan yang benar serta publikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang belum memenuhi asas transparansi menunjukkan adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor-faktor yang

mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas adalah sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas.

Menurut Mahmudi (2011: 251) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD. Penelitian Sari (2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian Nugraha (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh.

Penyajian laporan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.

Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005).

Berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih ada beberapa permasalahan sehingga perlu dilakukan perbaikan, bahwa dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selama 3 (tiga) tahun terakhir baru memperoleh penilaian kategori C dan pada tahun 2013 memperoleh nilai CC (Cukup Baik) artinya dalam hal penyajian laporan keuangan masih banyak hal yang harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam penyajian laporan keuangan yang ada.

Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 setelah sebelumnya BPK memberikan Opini Tidak Wajar (*disclaimer*) untuk periode 2009-2011. Menurut opini BPK, pemerintah Kabupaten Inhu harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dan dapat dipertanggung jawabkan karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Selain itu penyusunan laporan keuangan hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku yang tercantum dalam PP

Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (Inhukab,2013).

Penelitian Sagala (2011) membuktikan secara empiris bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian Azizah (2014) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain sistem pengendalian intern dan penyajian laporan keuangan, faktor lain yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan adalah aksesibilitas (Mulyana, 2006). Pengertian dari aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Adanya aksesibilitas maka diharapkan penyajian Laporan Keuangan Daerah dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Jika pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini karena adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah tentunya dapat melakukan pengawasan dengan lebih leluasa. Sehingga hal ini akan memaksa pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara jujur dan akurat. Hasil penelitian Mulyana (2006) membuktikan secara empiris bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Namun berbeda dengan penelitian Azizah (2014) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini juga menambahkan variabel gaya kepemimpinan berdasarkan jurnal Amalia (2014). Gaya pemimpin dalam pemerintahan menentukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bidang organisasi, oleh karena itu gaya kepemimpinan akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerjaan terhadap organisasi. Hasil penelitian Amalia (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Ananda (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang sama. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nur Azizah (2014) dengan menambahkan variabel gaya kepemimpinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2014. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2016.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu : 1)Apakah sistem pengendalian intern ber

pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?, 2)Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 3) Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 4)Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap upaya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2)Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap upaya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3)Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap upaya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4)Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap upaya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Masih ditemukan penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang

disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010). Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi, dimana semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan karena dalam penerapan sistem pengendalian intern yang baik, akan menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah.

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti

(2010). Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Hasil penelitian Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian

neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Penyajian neraca SKPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD, dimana semakin lengkap penyajian laporan keuangan sebuah SKPD maka akan semakin akuntabel laporan yang dibuat oleh instansi tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009).

Penelitian Mulyana (2006) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimana semakin mudah masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya dalam mengakses laporan keuangan suatu SKPD menunjukkan bahwa instansi yang bersangkutan telah menerapkan transparansi.

Penelitian Mulyana (2006) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan sebuah SKPD maka

akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu SKPD membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses laporan pertanggung jawaban yang dibuatnya.

Hubungan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemimpin bukan sekedar dapat mempengaruhi pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia untuk implementasi kebijakan, tapi jauh melampaui itu juga mempunyai power yang dapat digunakan untuk memaksa sumber daya yang lain.

Mardiana (2003: 121) dan Wijaya (2006: 127) menyatakan beberapa faktor penting situasional yang mempengaruhi keefektifitasan kepemimpinan adalah kualitas hubungan pemimpin-bawahan, tingkat struktur dalam tugas yang akan dikerjakan, dan kekuatan posisi pemimpin. Hal tersebut sesuai dengan dasar yang dikemukakan oleh Fiedler (dalam Robbins, 2006: 316) bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada faktor situasi (situasional), dengan kata lain efektivitas kepemimpinan bergantung pada keadaan dari kecocokan antara perilaku pemimpin dan tuntutan situasi. Hasil penelitian Amalia (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai yang ada di seluruh SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 29 SKPD. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sampel dibatasi hanya SKPD yang membuat Laporan Keuangan Daerah yaitu sebanyak 29 SKPD. Selanjutnya dari masing-masing SKPD yang menjadi sampel penelitian diambil 3 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan 2 orang staf keuangan, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 87 orang.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data tersebut diperoleh melalui kuisisioner yang disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian.

Adapun sumber data penelitian ini adalah tanggapan responden yang tertuang dalam kuisisioner yang disebarkan kepada sampel penelitian.

Definisi Operasional dan Teknik Pengukuran

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan sedangkan variabel dependennya adalah transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat diindikasikan dari hal berikut (dalam Aliyah dan Nahar, 2012):

1. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi *stakeholders*.
2. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
3. Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
6. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
7. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.
8. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independen adalah:

a. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan instrument yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) dan dikembangkan oleh Choirunisah (2008) dalam Kusumaningrum (2012) Terdapat tujuh indikator, yaitu:

- 1) Integritas data,
- 2) Ketepatan input dan posting data,
- 3) Prosedur otorisasi dokumen transaksi,
- 4) Tersimpannya dokumen sumber data,
- 5) Pembagian tanggungjawab,

- 6) Penentuan kebijakan dan standar akuntansi,
- (7) Implementasi kebijakan dan standar

b. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran, (b) neraca, (c) laporan arus kas, dan (d) catatan atas laporan keuangan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan;
- b) Andal;
- c) Dapat dibandingkan; dan
- d) Dapat dipahami.

c. Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, menurut Sande (2013) pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan 2 (dua) indikator seputar aksesibilitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah yaitu;

- a) Laporan keuangan dapat diakses dan
- b) Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum

d. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah perilaku pemimpin untuk mempengaruhi di dalam mengatur

atau mengkoordinasikan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang efektif. Indikator tersebut dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (SKPD). Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.

Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif member kan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2006).

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 (Sekaran, 2006).

c. Uji Normalitas Data

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis *multivariate*. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi yang tidak normal, maka uji statistik t. Normalitas dapat diuji dengan berbagai cara, diantaranya dengan normal probability plot.

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Dalam penelitian ini, gejala multikolinieritas dilihat dari:

- a) nilai *Tolerance* dan lawannya
- b) *Variance Inflation Factor* (VIF).

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID).

Uji Regresi Berganda

Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Transparansi dan Akuntabilitas
X₁ : Sistem Pengendalian Intern
X₂ : Penyajian Laporan Keuangan
X₃ : Aksesibilitas Laporan Keuangan
X₄ : Gaya Kepemimpinan

a : Konstanta

b₁: slope regresi atau koefisien regresi dari X₁

b₂: slope regresi atau koefisien regresi dari X₂

b₃: slope regresi atau koefisien regresi dari X₃

b₄: slope regresi atau koefisien regresi dari X₄

e : kesalahan residual (error term)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 20 dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Analisis hasil regresi dilakukan berdasarkan sub bab berikutnya.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Signifikan bila $r \text{ value} < \alpha$ (0,05) sehingga menerima H₁.
- 2) Tidak signifikan bila $r \text{ value} > \alpha$ (0,05) sehingga menolak H₁.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengembalian Kuisioner

Kuisioner diberikan kepada 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Inhu. Masing-masing SKPD diberikan tiga kuisioner kepada kepala dinas dan bagian keuangan. Jumlah kuisioner yang

diisi dan dikembalikan sebanyak 84 buah dengan tingkat respon 96,55%. Semua total kuisioner dapat digunakan karena telah sesuai dengan yang diinginkan penulis.

2. Identitas Responden

Untuk jenis kelamin responden diketahui sebanyak 48 orang atau 57,10% berjenis kelamin pria dan 36 orang atau 42,90% berjenis kelamin wanita. Dengan demikian sebagian besar responden adalah pria.

Tingkat pendidikan terakhir responden terdiri dari 6 orang atau 7,10% pendidikannya Master (S₂), 68 orang atau 81% berpendidikan Sarjana (S₁), 5 orang atau 6% berpendidikan DIII dan 5 orang atau 6% berpendidikan SLTA. Dengan demikian responden sebagian besar berpendidikan Sarjana (S₁).

Untuk jabatan responden diketahui sebanyak 5 orang atau 6% merupakan Kabid Keuangan, 38 orang atau 45,20% merupakan Kasubag Keuangan, 37 orang atau 44% merupakan staf keuangan dan 4 orang atau 4,80% merupakan Bendaharawan. Dengan demikian sebagian besar responden adalah Kasubag dan Staf keuangan.

Masa kerja responden diketahui sebanyak 4 orang atau 4,80 % masa kerjanya 16-20 tahun, 5 orang atau 6% masa kerjanya di atas 20 tahun, 53 orang atau 63,10% masa kerjanya 6-10 tahun, 13 orang atau 15,48% masa kerjanya 1 – 5 tahun dan 9 orang atau 10,72% masa kerjanya 11-15 tahun. Dengan demikian sebagian besar responden masa kerjanya adalah 6-10 tahun.

3. Hasil Pengujian Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Kesepuluh pertanyaan yang diajukan dalam variabel transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, duapuluh dua pertanyaan yang diajukan dalam variabel sistem pengendalian intern (X_1), empat pertanyaan yang diajukan dalam variabel penyajian laporan keuangan (X_2), tiga pertanyaan yang diajukan dalam variabel aksesibilitas (X_3), enam pertanyaan yang diajukan dalam variabel gaya kepemimpinan (X_4) semuanya memiliki r hitung $> r$ tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan adalah valid sehingga pertanyaan layak dipergunakan lagi dalam penelitian ini.

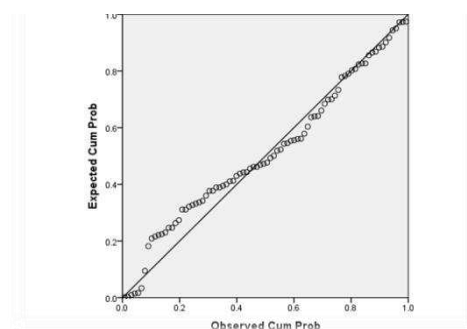
b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian realibitas atau keandalan instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa data tersebut reliabel.

4. Hasil Pengujian Normalitas Data

Untuk melihat apakah normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dapat dilihat dari *normal probability plot*. *Normal probability plot* dari penelitian ini terlihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Hasil Pengujian Normalitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Hasil Pengujian Multikoleniaritas

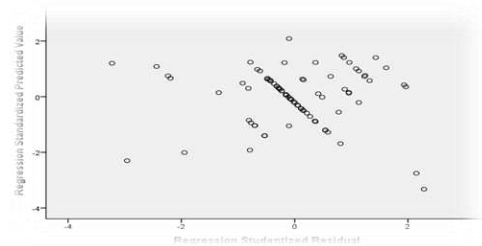
Pengujian multikolinieritas dilaksanakan dengan menggunakan VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF > 10 dan tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Untuk setiap variabel independen nilai *tolerancenya* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

b. Hasil Pengujian Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan melalui uji Durin Watson (DW). Jika angka DW dibawah -2, maka terdapat autokorelasi positif. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, maka tidak terdapat autokorelasi. Jika angka DW diatas +2 maka terdapat autokorelasi negatif.

c. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 4.2.
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Dari gambar uji heteroskedastisitas, terlihat sebaran data dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian statistik regresi linier berganda dengan menggunakan

program SPSS 20. Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 2,403 + 0,251 X_1 - 0,037X_2 + 0,103X_3 + 0,098X_4 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,110 > 1,990$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu.

Artinya bila sistem pengendalian terhadap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang handal dan informatif, terciptanya pengamanan aset negara serta menjamin ketaatan dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan.

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010). Namun tidak sejalan dengan penelitian Nugraha (2011).

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,578 < 1,990$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,565 yang lebih besar dari α sebesar 0,05. Hasil penelitian membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu.

Kondisi ini disebabkan penyajian laporan keuangan oleh masing-masing SKPD belum sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi Kabupaten Indragiri Hulu.

Adanya permasalahan pada penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang masih belum memenuhi kriteria penyusunan laporan yang benar serta publikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang belum memenuhi asas transparansi menunjukkan adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Sagala (2011) dan Sande (2013) yang menemukan bahwa penyajian laporan

keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,416 > 1,990$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Hasil penelitian membuktikan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahami (Rohman, 2009).

Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006) dan menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Azizah (2014) menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi namun tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,070 < 1,990$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,288 yang lebih besar dari α sebesar 0,05. Hasil penelitian membuktikan bahwa gaya

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan pada SKPD Kabupaten Inhu belum mampu mempengaruhi pegawai untuk dapat bekerja lebih baik lagi dalam rangka mencapai tujuan organisasi karena pada hakikatnya organisasi sektor publik terbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda (2013) namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2014) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Uji Goodness of Fit (Adj. R²)

Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar Adj. R² = 0,418. Hal ini berarti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan gaya kepemimpinan sebesar 41,80%, sementara sebesar 54,20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

- keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. Hal ini mendukung penelitian Nugraha dan Susanti (2010), namun tidak mendukung penelitian Nugraha (2011).
2. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. Hal ini mendukung penelitian Azizah (2014), namun tidak mendukung penelitian Sagala (2011) dan Sande (2013)
 3. Aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. Hal ini mendukung penelitian Mulyana (2006), namun tidak mendukung penelitian Azizah (2014).
 4. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. Hal ini mendukung penelitian Ananda (2013), namun tidak mendukung penelitian Amalia (2014).
 5. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan gaya kepemimpinan sebesar 41,80%, sementara sebesar 54,20% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana, komitmen pegawai, teknologi informasi,

budaya organisasi dan lain sebagainya.

2. Setiap satuan kerja hendaknya memiliki sumber daya yang kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terutama dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penyajian laporan keuangan karena berdasarkan hasil penelitian kebanyakan pegawai yang menjadi responden penelitian mengeluhkan masalah kurangnya pemahaman tentang SPI dan Penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Aida Nahar, 2012, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189
- Azizah, Nur, 2014 *Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan* jraam.polinema.ac.id/index.php
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Undip, Semarang.
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Mulyana, Budi, 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan*

- terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Nugraha, Darya Setya dan Apriyanti Susanti, 2010, *The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2
- Nugraha, Darya Setya, 2011, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi)*, *Jurnal Sigma-Mu*, Vol. 3 No.1 – Maret 2011
- Rohman, Abdul, 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang
- Sagala, Marjuki, 2011, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Di Kabupaten Samosir*, Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Sande, Peggy, 2013, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap*
- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), *ejournal.unp.ac.id/*
- Sari, Diana, 2012, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Procceding* 27 Maret 2012
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Method For Business*, Buku 2. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian, Intern Akuntansi*. SNA XIII Purwokerto
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- <http://www.bpkriau.go.id>), *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kabupaten Indragiri Hulu*
- Inhukab. 2013. "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013". [www.inhukab.go.id/sites/default/files/LAKIP INHU 2013.pdf](http://www.inhukab.go.id/sites/default/files/LAKIP%20INHU%202013.pdf)

